

RESUME

**KAJIAN PENYUSUNAN KERANGKA EKONOMI
MAKRO DAERAH PROVINSI BANTEN
(PROYEKSI TAHUN 2021)**



Disusun oleh:
Ketua TIM
Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.Ec

**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberadaan KEMD dalam dokumen perencanaan tentu tidak sebatas untuk memenuhi tututan regulasi. Bappenas (2019) menyebutkan bahwa penyusunan rancangan KEM menjadi sangat penting di dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional dan daerah terutama yang tercermin dari indikator makro seperti angka pertumbuhan ekonomi, laju inflasi termasuk pertumbuhan sektoral seperti pertanian, industri, dan sebagainya. Untuk itu dalam penyusunannya diperlukan pendalaman secara komperhensif yang melibatkan pakar atau pun stakeholder terkait agar keberadaan KEMD dapat dijadikan panduan lebih lanjut dalam peningkatan sinergitas perencanaan pusat dan daerah atau pun penentuan program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian indikator makro pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menyusunan Kerangka Ekonomi Daerah yang menjadi salah bagian dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Banten 2021. (2) Menetapkan target capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuk (TPT), Gini Ratio, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Banten pada tahun 2021 (3) Menyusun rekomendasi upaya pencapaian target indikator makro pada tahun 2021 melalui penetapan prioritas pembangunan dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat. Jenis data yang digunakan dalam studi ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini yaitu wawancara dan studi pustaka.

REKOMENDASI

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Banten pada tahun 2019 tumbuh 5.36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.02% (yoy). Sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dari sisi permintaan terutama didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan kinerja industri pengolahan, konstruksi, Real Estate.

Proyeksi pertumbuhan PDRB Provinsi Banten menunjukkan PDRB akan meningkat 5.55 persen, baik pada tahun 2020 dan 2021. Namun, pada tahun 2020, terjadi pandemik COVID-19 yang diperkirakan berdampak terhadap ekonomi Provinsi Banten. Dengan menggunakan analisis IO dengan tiga scenario, yaitu optimis, moderat, dan pesimis, hasil menunjukkan bahwa dampak dari pandemik COVID-19 diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan PDRB Banten pada tahun 2020 sekitar -0.79 persen (optimis), -1.01 persen (moderat), dan -1.63 persen (pesimis).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi provinsi Banten sebagai dampak pandemik COVID-19 dan tantangan kondisi perekonomian global harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Hal tersebut mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kunci utama dalam penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi Banten sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan sektor kunci provinsi Banten yang memiliki *multiplier* output dan keterkaitan ke belakang tinggi. Hasil analisis multiplier output menunjukkan bahwa industri pengolahan (industri besi, baja dan barang dari logam (2.12); industri komputer, elektronik, dan peralatan listrik (2.06); industri kertas (1.97); dan industri karet (1.96)), konstruksi (1.94) dan transportasi (1.95) memiliki potensi tinggi untuk pertumbuhan output provinsi Banten. Sektor-sektor tersebut juga memiliki keterkaitan ke belakang yang tinggi, artinya pertumbuhan sektor tersebut juga akan meningkatkan permintaan bahan baku.

2. Dari sisi penawaran, pemerintah daerah harus mendukung pertumbuhan konsumsi masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan menjaga tingkat inflasi. Peningkatan daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan mendorong perkembangan sector ekonomi potensial yang menyumbang peningkatan pendapatan. Sektor yang memiliki *multiplier* pendapatan tinggi di provinsi Banten adalah industri pengolahan (industri kimia (3.26); industri makanan & minuman dan tembakau (2.58), dan industri besi baja dan barang dari logam (2.00)), transportasi (laut (2.26) dan udara (2.20)), dan perdagangan (1.90).
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi potensial. Berbagai proyek infrastuktur yang saat ini dikerjakan di provinsi Banten yaitu proyek prioritas Tol Serang-Panimbang, pembangunan pelabuhan wisata, peningkatan konektivitas jalan di Banten selatan, perluasan ruas jalan Bayah- Cibarenok dan Cibaliung-Sumur, dan pengembangan kota baru.
4. Mendorong pengembangan sektor pertanian dengan fokus pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produk. Sektor peternakan memiliki *ltiplier* output dan keterkaitan ke belakang yang tinggi. Selain itu, pengembangan pertanian dan perkebunan fokus komoditas berpotensi pasar luas seperti durian, kopi, emping, kelapa, dan komoditas unggulan lainnya.
5. Memperkuat dan mempermudah regulasi dan perizinan untuk mengundang investor berinvestasi di Banten. Kinerja pelayanan *One Single Submission* (OSS) dan Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) harus ditingkatkan untuk menarik minat investor.

Pengangguran

Berdasarkan data dari BSP Provinsi Banten, sebagian besar penduduk bekerja di sektor formal (58.74 persen) dan sisanya bekerja di sektor informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan mereka yang berstatus buruh/karyawan. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Banten adalah sektor industri dan sektor perdagangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada tahun 2019 adalah 8.11 persen. TPT lulusan SMK masih menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain yaitu 13.03% pada Agustus 2019.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan dari 63.49 persen menjadi 64.52 persen. Apabila dilihat dari TPAK, Kabupaten Tangerang memiliki pasokan tenaga kerja tertinggi (66.69 persen) dan yang terendah berada di Kota Tangerang Selatan (61.32 persen). Indikator lain adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Indikator ini dapat menggambarkan ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari tenaga kerja memiliki jam kerja rendah.

Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran (pencari kerja) di Banten. Dilihat dari komposisi pencari kerja menurut pendidikan, pencari kerja di Provinsi Banten didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah (SMA/SMK). Persentase pencari kerja yang berpendidikan menengah maupun tinggi (diploma dan sarjana) meningkat dibanding tahun lalu. Sementaraitu, persentase pencari kerja yang mengenyam pendidikan menengah (SMA/SMK) meningkat. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten.

Kabupaten Tangerang adalah kabupaten dengan penduduk terbesar di Provinsi Banten. Sementara penduduk bekerja terkecil berada di Kota Cilegon. Apabila dilihat dari TPAK, Kabupaten Tangerang memiliki pasokan tenagakerja tertinggi (66.69 persen), dan yang terendah berada di Kota Tangerang Selatan (61.32 persen). Pengangguran (pencari kerja) terbanyak di Kabupaten Tangerang, yaitu sebanyak 164 ribu orang. Kondisi ini terjadi mengingat Kabupaten Tangerang merupakan pusat kegiatan ekonomi propinsi Banten sehingga menjadi daerah tujuan utama pencari kerja di Provinsi Banten. Namun dilihat dari TPT yang tertinggi adalah Kabupaten Serang.

Berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan terkait pengurangan pengangguran di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Indonesia di topan oleh sekto rindustri manufaktur pengolahan, akan tetapi jumlah pengangguran dengan pendidikan SMK relatif tinggi. Padahal seharusnya lulusan SMK banyak diserap di sektor industri manufaktur.

2. Hal ini karena tingginya pertumbuhan sektor tersier yang diiringi dengan tingginya laju investasi terutama penanaman modal asing (PMA) di sektor perdagangan dan jasa. Perubahan struktural pada ekonomi Indonesia dan tren investasi membuat permintaan tenaga kerja juga berubah. Jika hal tersebut berlanjut maka permintaan tenaga kerja untuk sektor jasa dan perdagangan yang meliputi tenaga pemasar dan tenaga penjual akan meningkat. Sementara lulusan SMK dipersiapkan untuk bekerja di bagian produksi atau menjadi operator di suatu perusahaan atau pabrik. Artinya ada gap dari sisi supply dan *demand* untuk tenaga kerja di sini. Menurut studi tersebut, ada beberapa aktivitas dan jenis pekerjaan yang dapat diotomatisasi alias digantikan oleh robot di era industri 4.0. Diantaranya yang dilakukan oleh Riset lembaga konsultan global McKinsey dan Company, menunjukkan bahwa dampak industri 4.0 ini akan menghilangkan beberapa lapangan pekerjaan dan menciptakan sejumlah lapangan kerja baru. Jenis pekerjaan yang digantikan robot adalah yang bersifat rutin dan *predictable physical activities* seperti pengumpulan (20 persen dari jam kerja di Indonesia) dan pemrosesan data (10 persen dari total jam kerja di Indonesia). Menurut Parry (2017), Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Artinya pangsa pekerjaan yang sekarang diisi oleh sejumlah lulusan SMK seperti bagian produksi dan operator berpotensi digantikan oleh mesin. Akibatnya lulusan SMK bisa kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kerjasama antara sekolah dengan perusahaan agar lulusan SMK dapat langsung bekerja sesuai lulus. Langkah ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha untuk mendorong perusahaan membuat program magang dan pelatihan untuk SDM termasuk lulusan SMK.
3. Membuat program pelatihan dan pendampingan dalam rangka *upskilling* dan *reskilling* yang dapat diakses oleh lulusan SMK. Selain itu pemerintah juga perlu mendorong program sertifikasi profesi dan keahlian untuk para lulusan SMK.

Salah satu upaya pemerintah pusat untuk mengurangi angka pengangguran adalah mendorong memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat daerah. Pasalnya, keberadaan BLK memang terbukti telah mampu memberi peluang kerja dan menciptakan *skill* bagi pencari kerja. **BLK didirikan sampai pada level kecamatan** agar bisa memfasilitasi semua pemuda yang ingin mendapatkanketerampilansesuai kebutuhan industri sekarang ini. Mengalokasikan anggaran lebih untuk pembangunan BLK sampai pada level kecamatan. Baik Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) maupun pelatihan berbasis masyarakat (PBM).

Kemiskinan

Angka kemiskinanProvinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2019 mengalami penurunan. Penduduk miskin di daerah perdesaan dan perkotaan juga turun. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 71.66 persen.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan Maret 2019 di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mieinstan, serta roti. Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan terkait pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan baik dikota maupun di desa. Tingkat kemiskinan di desa jauh lebih tinggi daripada dikota. Kondisi kemiskinan berkaitan erat dengan kurangnya lapangan pekerjaan. Berkurangnya lapangan pekerjaan yang membuat banyak masyarakat menjadi pengangguran, dan semakin banyaknya pengangguran maka semakin banyak pula angka kemiskinan.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pelatihan *Soft Skill*, dan rendahnya akses terhadap modal menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan akses terhadap lapangan kerja dan modal. Sehingga proses pembukaan lapangan kerja dapat dilakukan secara optimal dengan wirausaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui bantuan modal yang optimal. Penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan dengan penggunaan dana desa untuk program padat karya. Diperlukan juga pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan secara gratis kepada yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan sekolah. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial sampai pada level desa atau kelurahan diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat sehingga lebih memudahkan usaha mereka untuk kegiatan usaha dan sekolah.

2. Bantuan sosial perlu diberikan pada masyarakat yang terdampak pandemi COVID 19. Kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat melalui *work from home* dan liburunya sekolah dan kegiatan keagamaan akan berdampak negatif terhadap pendapatan masyarakat. Memberikan bantuan berupa fasilitas dan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan, subsidi ini dapat berupa barang pokok/sembako yang di berikan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan pemberian fasilitas dan subsidi oleh pemerintah maka sangat diharapkan masyarakat dapat hidup dengan selayaknya dan dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Ketimpangan Wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia

Ketimpangan wilayah menggambarkan tingkat kesenjangan capaian pembangunan antar wilayah, dalam hal ini capaian pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten. Indikator capaian pembangunan yang dimaksud disini adalah distribusi pendapatan yang dilihat dari PDRB per kapita. Ketimpangan wilayah dalam kajian ini dihitung dengan pendekatan Indeks Williamson (IW). Kriteria IW yaitu jika $IW < 0.5$ kesenjangan rendah dan $IW \geq 0.5$ kesenjangan tinggi.

Menurut data publikasi BPS (2020) diperoleh gambaran bahwa selama ini terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat besar antar wilayah di Provinsi Banten. Tahun 2017, IW Banten sebesar 0.70 menjadi 0.63 di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan dan pemerataan pembangunan setiap tahunnya, khususnya dari distribusi pendapatan antar wilayah di Banten. Pada tahun 2020 dan 2021, hasil analisis memproyeksikan

bahwa distribusi pendapatan antar wilayah terus mengalami perbaikan dengan nilai IW sebesar 0.63 di tahun 2020 dan 0.62 di tahun 2021.

Namun jika ditinjau lebih dalam berdasarkan nilai PDRB per kapita antar wilayah, terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah Selatan seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang dengan wilayah lainnya. Kota Cilegon dan Kota Tangerang memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah lainnya di Provinsi Banten. Pendapatan per kapita penduduk di Kota Cilegon bahkan mencapai Rp 258.4 juta/kapita/tahun di tahun 2021. Sementara pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Lebak dan Pandeglang masing-masing hanya Rp 24.2 juta/kapita/tahun dan Rp 25.8 juta/kapita/tahun.

Ada beberapa penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah di Banten, khususnya wilayah Selatan Banten (Lebak dan Pandeglang) dengan wilayah lainnya, yaitu antara lain:

1. *Ketersediaan infrastruktur* yang berbeda antar wilayah yang menyebabkan kegiatan investasi cenderung terjadi di daerah yang relatif telah berkembang seperti Tangerang dan Cilegon. Ketersediaan infrastruktur sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa yang berimplikasi terhadap ongkos produksi.
2. Konsentrasi kegiatan sosial ekonomi terpusat di wilayah yang relatif telah berkembang, seperti sektor industri dan jasa (termasuk jasa pendidikan) yang cenderung terpusat di wilayah utara Banten. Hal ini mendorong tingkat kesenjangan yang semakin melebar antar wilayah utara dan selatan.
3. Migrasi penduduk produktif yang memiliki skill/terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena disana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar dan kesempatan merubah masa depan yang lebih baik.
4. Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM). SDM berperan sebagai faktor kunci bagi percepatan pembangunan suatu wilayah. Ketimpangan pembangunan SDM dilihat dari capaian IPM Banten, terutama aspek pendidikan seperti rata-rata lama sekolah (RLS) yang relatif rendah di wilayah Selatan Banten.

Adapun upaya untuk mengatasi ketimpangan wilayah, terutama pemerataan distribusi pendapatan antar wilayah, yaitu dengan cara peningkatan produktivitas dan output wilayah melalui kebijakan dan program yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten antara lain:

1. Pengembangan infrastruktur fisik dasar di wilayah Selatan Banten yang diiringi pengembangan ekonomi berbasis potensi wilayah untuk konektivitas, memudahkan akses pasar serta teknologi pendukung.
2. Memperkuat sektor pertanian di wilayah selatan melalui investasi sarana prasarana pertanian irigasi, bantuan alsintan, pengembangan produk olahan pertanian, memperkuat kelembagaan tani di sentra- sentra produksi pertanian serta menjaga stabilitas harga pangan.
3. Pengembangan jejaring pasar bagi produk pertanian dan UMKM di sentra-sentra produksi melalui pengembangan Pusat Pemasaran Produk Pertanian Banten berbasis online untuk menangkap peluang pasar di era 4.0.
4. Peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pendirian Balai Kerja tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di wilayah- wilayah perdesaan.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan terutama jenjang menengah umum dan kejuruan serta pengembangan kurikulum lokal yang terkoneksi dengan kebutuhan dunia usaha. Meningkatnya kualitas pendidikan (khususnya Kejuruan) mempermudah akses terhadap dunia kerja dan bahkan mampu berwirausaha, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengendalian Inflasi

Inflasi terjadi karena tiga faktor: (1) *demand pull* – faktor tarikan dari sudut permintaan dan (2) *supply push* – faktor dorongan dari sudut permintaan, dan (3) *demand-supply side* – dua faktor ini berinteraksi karena respon terhadap perubahan salah satunya. *Demand pull* terjadi karena tekanan permintaan yang sifatnya siklikal atau musiman seperti pada awal bulan karena masyarakat mendapatkan tambahan penerimaan berupa upah dan gaji dan pada saat hari besar keagamaan seperti bulan Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Harga-harga pasti akan mengalami kenaikan karena terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*). Sementara inflasi berbasiskan tekanan dari faktor *supply* berupa kenaikan harga-harga barang dan jasa baik kerena faktor fundamental seperti perubahan pada indikator ekonomi makro dan faktor non-fundamental yaitu *volatile food* (bergerak naik harga pangan) dan *administrated price* (kebijakan harga pemerintah seperti kenaikan harga BBM dan TDL).

Berdasarkan data pergerakan inflasi di Provinsi Banten, faktor utama penyumbang inflasi adalah bahan makanan diikuti oleh biaya kesehatan dan makanan jadi termasuk rokok dan perumahan. Manajemen rantai pasok pangan seperti beras, cabai dan bawang merah sangat krusial dalam mengendalikan inflasi. Volatilitas harga-harga pangan sebagian besar karena faktor gangguan produksi baik karena hama penyakit dan alam seperti hujan dan kekeringan dan transportasi dari pusat produksi sampai kepada pasar eceran termasuk di dalamnya empat fungsi pemasaran: perubahan tempat (*place*), perubahan bentuk (*form*), perpindahan kepemilikan (*ownership*) dan perbedaan waktu (*time*). Jika keempat fungsi pemasaran ini dapat dikelola dengan baik maka harga pangan dapat dikendalikan.

Di tingkat provinsi terdapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang beranggotakan lembaga-lembaga pemangku kepentingan yaitu Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya. Firdausy (2016) membagi fungsi TPID dalam mengendalikan inflasi: **kecukupan produksi, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi ekspektasi.**

a) Kecukupan Produksi

- 1) Dinas Pertanian atau dinas terkait memastikan produksi bahan pangan khususnya melihat permintaan siklikal dan juga perubahan iklim. Kebijakan pengadaan benih atau bibit dapat menjadi pilihan untuk memberikan insentif kepada petani/peternak agar dapat meningkatkan kapasitas produksi. Karena produksi pertanian tergantung kepada faktor alam, harus ada kebijakanyang bersifat adopsi dan adaptasi terhadap perubahan iklim seperti penyediaan bibit/benih yang adaptif terhadap perubahan iklim (suhu, hujan) serta informasi parameter cuaca yang tepat agar petani dapat melakukan penyesuaian jadwal tanam.
- 2) Memetakan potensi produksi (jenis, waktu tanam, luas, lokasi dan potensi gangguan produksi) secara real time dan berbasis IT sehingga dapat diketahui potensi dan produksi dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian antara produk/pasokan dan konsumsi/permintaan (gap analysis).
- 3) Dinas PU memastikan infrastruktur seperti irigasi dan jalan usahatani/perdesaan pendukung produksi pertanian berfungsi dengan baik.

b) Kelancaran Distribusi

- 1) Dinas Perdagangan memastikan persediaan pangan mencukupi terutama jaminan pasokan dari daerah termasuk kantong- kantong atau gudang- gudang penyimpanan baik yang dimiliki oleh swasta atau lembaga milik pemerintah.
- 2) BUMD yang bergerak di bidang perdagangan dapat menjadi badan penyangga pergerakan harga baik sebagai pembeli produksi petani maupun operasi pasar ketika harga di atas ambang batas terutama pada kota atau daerah yang menjadi indikator inflasi di Provinsi Banten, yaitu Tangerang.
- 3) Bekerjasama dengan Kementrian Pertanian/Dinas Pertanian/BUMD perdagangan membangun toko tani atau warung tani pada daerah yang tidak memiliki pasar tetap.

c) Keterjangkauan Harga

- 1) Mengembangkan pusat informasi harga secara real time yang dapat diakses oleh semua kalangan. Dengan informasi harga ini konsumen akan mendapatkan harga yang wajar dan menjadi penghambat pihak-pihak yang akan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen. Dengan data harga ini dapat diketahui pula koneksitas atau integrasi pasar sehingga dapat diketahui transmisi perubahan harga pangan. Pemerintah dapat lebih cepat melakukan antisipasi dan mitigasi kenaikan harga pangan.
- 2) Operasi pasar murah ketika terjadi trend kenaikan harga akibat karena permintaan yang tinggi dangangguan produksi. Data historis dapat memberikan petunjuk kapan terjadi kelangkaan pasokan.

d) Komunikasi Ekspektasi

- 1) Melakukan komunikasi dengan para asosiasi agar memberlakukan harga wajar walaupun ada potensi keuntungan yang cukup besar
- 2) Melakukan komunikasi dengan media masa tentang kebijakan pengendalian inflasi dan edukasi masyarakat agar dapat berbelanja pada tingkat kewajaran.